



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 15 April 2021

Halaman: 2

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

RUGIKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Perlu Ditinjau

YOGYA (KR) - Sistem rujukan yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu ditinjau ulang. Terutama menyangkut keberlangsungan layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemerintah. Hal ini karena anggaran yang dialokasikan Pemkot Yogya untuk jaminan kesehatan warganya cukup besar.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Suryani, menjelaskan universal health coverage (UHC) di Kota Yogya sudah mencapai 95,53 persen. "Artinya hampir semua penduduk kota sudah terkover jaminan kesehatan. Baik yang secara mandiri, dibiayai perusahaan maupun dibiayai oleh pusat atau Pemkot," urainya, Rabu (14/4).

Bagi yang belum terkover itu pun bisa mendaftarkan ke program Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD). Syaratnya cukup mudah yakni memiliki KTP Kota Yogya dan bersedia dirawat di kelas 3. Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkot Yogya untuk program PDPD pun cukup besar mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam sebulan, Pemkot harus membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 100.348 penduduk Kota Yogya sebesar Rp 3,77 miliar. Program PDPD memang sengaja digulirkan untuk mengakomodasi warga yang tidak diampu oleh pusat untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.

Suryani menambahkan, BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang. Pasien harus ditangani di faskes pertama. Jika tidak sanggup baru diujuk ke faskes tipe D, kemudian tipe C, tipe B hingga tertinggi tipe A. "Ini kan cukup panjang. Padahal kita punya faskes tipe B yakni RS Jogja. Akibat rujukan berjenjang pasien di sana sangat berkurang. Ibarat kerannya tidak dibuka. Ini bisa berdampak pada operasional RS Jogja," urainya.

Oleh karena itu, anggota Komisi D ini mendesak agar ada peninjauan ulang sistem rujukan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini karena anggaran yang sudah dialokasikan Pemkot cukup besar dan tidak bisa masuk kembali ke kas daerah jika tidak dipergunakan. Berbeda saat menggulirkan program Jamkesda, berapapun anggaran yang tidak terserap bisa kembali masuk ke kas daerah.

Salah satu yang bisa diupayakan ialah menjalin MoU baru antara kepala daerah dengan BPJS Kesehatan. Khususnya terkait penduduk Kota Yogya agar bisa dengan mudah mengakses layanan di RS Jogja menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus diribetkan dengan rujukan berjenjang.

"Anggaran untuk BPJS Kesehatan dari APBD Kota Yogya itu besar sekali. Jika tidak terpakai ya sudah, tidak bisa kembali ke kas daerah. Paling tidak ada timbal balik bagi daerah agar RSUD bisa terus menjalankan layanan," tandas Suryani.

Suryani SE MSi
Fraksi PDI Perjuangan

KOR-admewa

4. ☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005